

ANALISIS KOMPARASI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BITUNG DAN KOTA
TOMOHON PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2021-2024COMPARATIVE ANALYSIS OF THE FINANCIAL PERFORMANCE OF THE REGIONAL GOVERNMENTS
OF BITUNG CITY AND TOMOHON CITY, NORTH SULAWESI PROVINCE IN
2021-2024Clay C. Wongkar¹, Frederik G. Worang², Victoria N. Untu³¹²³Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi ManadoE-mail: 1claychristofelwongkar@gmail.com, 2frederikworang@unsrat.ac.id,
3neisye@unsrat.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta membandingkan kinerja keuangan Pemerintah Kota Bitung dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara pada periode 2021-2024. Analisis dilakukan dengan memanfaatkan empat rasio keuangan utama, yaitu kemandirian, ketergantungan, efektivitas, dan efisiensi, yang digunakan untuk menilai kemampuan masing-masing pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara mandiri, mengoptimalkan penerimaan, serta menyelenggarakan anggaran dengan efisien dan efektif. Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif deskriptif dan Uji Beda T-test dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) masing-masing daerah. Hasil analisis menunjukkan bahwa rasio kemandirian, ketergantungan, dan efektivitas tidak terdapat perbedaan yang signifikan, sedangkan rasio efisiensi menunjukkan perbedaan yang signifikan antara kedua daerah.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan, Rasio Kemandirian, Rasio Ketergantungan, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi

Abstract: This study aims to analyze and compare the financial performance of the Bitung and Tomohon City Governments in North Sulawesi Province during the 2021-2024 period. The analysis uses four main financial ratios, namely independence, dependency, effectiveness, and efficiency, to assess each local government's ability to manage finances independently, optimize revenue, and administer budgets efficiently and effectively. This study employs a descriptive quantitative approach and an independent t-test using secondary data obtained from the Budget Realization Reports (LRA) of each region. The results indicate that the independence, dependency, and effectiveness ratios do not show significant differences, while the efficiency ratio demonstrates a significant difference between the two regions.

Keywords: Financial Performance, Independence Ratio, Dependency Ratio, Effectiveness Ratio, Efficiency Ratio

Article History

Received: Januari 2026

Reviewed: Januari 2026

Published: Januari 2026

Plagirism checker no 1703

Doi : prefix doi :

10.8734/musytari.v1i2.359

Copyright : author**Publish by : musytari**

This work is licensed under
a [creative commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
[attribution-noncommercial](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
[4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia berkaitan langsung dengan penerapan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 32/2004 dan UU No. 23/2014, yang memberikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai potensi wilayah. Dengan pendelegasian ini, pemerintah daerah bertanggung jawab mengelola keuangan secara mandiri, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks desentralisasi fiskal, kemampuan daerah menjaga keberlanjutan keuangan menjadi syarat penting agar fungsi pemerintahan dan pelayanan publik dapat berjalan efektif dalam jangka panjang (Harahap *et al.*, 2023). Oleh sebab itu, keberhasilan otonomi daerah ditentukan tidak hanya oleh struktur kelembagaan, tetapi juga oleh kualitas pengelolaan keuangan.

Sejalan dengan hal tersebut, capaian kinerja keuangan menjadi tolok ukur utama untuk menilai efisiensi dan tanggung jawab pengelolaan anggaran. Kinerja yang baik menunjukkan kemampuan daerah mengoptimalkan sumber daya fiskal demi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan UU No. 23/2014 yang menekankan efektivitas, efisiensi, serta perhatian terhadap potensi daerah dan hubungan dengan pemerintah pusat.

Dalam rangka mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan kepada masyarakat, pemerintah daerah menyusun laporan keuangan yang menggambarkan kondisi serta hasil pengelolaan anggaran dalam satu periode tertentu. Penyajian laporan yang berkualitas, terbuka, dan mudah dipahami berperan penting dalam memperkuat akuntabilitas publik sekaligus menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan keuangan internal. Di samping itu, dukungan perkembangan teknologi informasi turut mendorong keterbukaan akses terhadap Laporan Realisasi Anggaran (LRA), sehingga masyarakat memiliki ruang yang lebih luas untuk melakukan pemantauan dan penilaian secara objektif serta berkesinambungan (Rumokoy *et al.*, 2023).

Berdasarkan kondisi tersebut, kajian perbandingan kinerja keuangan antar pemerintah daerah menjadi relevan untuk mengidentifikasi perbedaan capaian serta pola pengelolaan fiskal. Evaluasi tersebut dapat dilakukan melalui perbandingan antara anggaran dan realisasi pendapatan maupun belanja daerah, sehingga mampu memberikan gambaran mengenai efektivitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Perbedaan capaian dan pola pengelolaan fiskal antar daerah menunjukkan bahwa kinerja keuangan dipengaruhi oleh karakteristik ekonomi dan arah pembangunan wilayah. Atas dasar tersebut, Kota Bitung dan Kota Tomohon dipilih sebagai objek kajian karena memiliki struktur perekonomian yang berbeda. Kota Bitung berkembang sebagai kota pelabuhan dan industri perikanan, dengan sektor perikanan sebagai primadona, khususnya tuna dan cakalang, yang mendukung pendapatan daerah dan lapangan kerja. Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bitung kelas A memungkinkan penangkapan ikan dalam jumlah besar, sementara kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) mengatur zona dan kuota penangkapan (Prasetyadi, 2023; Rabbi, 2021).

Sebaliknya, Kota Tomohon lebih mengandalkan sektor pariwisata dan pertanian, dengan 96 destinasi wisata, termasuk 42 destinasi unggulan, serta penyelenggaraan Tomohon International Flower Festival (TIFF) yang berkontribusi pada perekonomian lokal dan penciptaan lapangan kerja (Redaksi, 2024). Di sisi lain, kota ini juga memiliki kondisi geografis dan alam yang mendukung perkembangan wisata serta pertanian bunga, memanfaatkan potensi sumber

daya manusia yang sejuak, berbudaya, dan religius. Oleh karena itu, sebagai dasar empiris dalam menilai kondisi keuangan kedua daerah tersebut, data Laporan Anggaran dan Realisasi Pendapatan serta Belanja Daerah selama periode 2021-2024 disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Laporan Anggaran dan Realisasi Pendapatan serta Belanja Daerah

Kota / Tahun	Pendapatan (Anggaran)	Pendapatan (Realisasi)	(%)	Belanja (Anggaran)	Belanja (Realisasi)	(%)
Bitung 2021	855,82	954,15	111,49	853,40	808,61	94,05
Bitung 2022	880,17	955,75	108,59	882,67	1.131,65	128,21
Bitung 2023	824,37	873,12	105,91	890,56	1.081,00	121,38
Bitung 2024	865,70	787,34	90,95	862,20	692,89	80,36
Tomohon 2021	651,45	670,31	102,89	657,10	618,00	94,05
Tomohon 2022	597,39	612,99	102,61	671,11	719,40	107,19
Tomohon 2023	637,74	616,09	96,60	662,78	638,55	96,34
Tomohon 2024	694,51	662,55	95,40	695,50	629,65	90,53

Sumber: Portal Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)

Data pada Tabel 1 memperlihatkan bahwa Kota Bitung menunjukkan realisasi pendapatan tertinggi pada tahun 2021 dan realisasi belanja yang melampaui anggaran pada tahun 2022 - 2023, sementara pada tahun 2024 terjadi penurunan kinerja baik dari sisi pendapatan maupun belanja. Di sisi lain, Kota Tomohon relatif menunjukkan realisasi pendapatan dan belanja yang lebih stabil, meskipun juga mengalami penurunan pada tahun 2024.

Dengan mempertimbangkan perbedaan karakteristik ekonomi dan dinamika realisasi APBD tersebut, analisis komparasi kinerja keuangan antara Pemerintah Daerah Kota Bitung dan Kota Tomohon menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara objektif mengenai perbedaan kinerja keuangan kedua daerah tersebut serta menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi peningkatan pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Sulawesi Utara.

Tujuan Penelitian

Sejalan dengan fakta empiris yang telah diuraikan, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Bitung dan Kota Tomohon diukur dari rasio kemandirian
2. Untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Bitung dan Kota Tomohon diukur dari rasio ketergantungan
3. Untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Bitung dan Kota Tomohon diukur dari rasio efektivitas
4. Untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Bitung dan Kota Tomohon diukur dari rasio efisiensi

TINJAUAN PUSTAKA

Pemerintah Daerah

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, pemerintah daerah merupakan entitas yang diberi kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai

prinsip otonomi seluas-luasnya (UU No. 23 Tahun 2014). Otonomi ini menempatkan pemerintah daerah sebagai pelaksana utama pengelolaan urusan lokal, termasuk pengelolaan sumber daya keuangan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya, kecuali yang ditetapkan untuk pemerintah pusat. Dengan demikian, tanpa otonomi, pemerintah daerah tidak memiliki kapasitas untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan secara mandiri.

Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja keuangan daerah merupakan indikator utama dalam menilai efektivitas pengelolaan fiskal dan penerapan otonomi. Menurut Wiratna (2017) sebagaimana dikutip Dilliana dan Herdi (2022), kinerja mencerminkan hasil evaluasi pekerjaan yang dibandingkan dengan standar atau kriteria yang ditetapkan, serta menjadi dasar transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan. Halim (2016) dalam Ratu *et al.*, (2023) menambahkan bahwa kinerja keuangan daerah mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi sesuai regulasi yang berlaku. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2019 menegaskan bahwa kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan memiliki kewenangan untuk:

1. Menyusun rancangan Perda APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban APBD
2. Mengajukan rancangan tersebut kepada DPRD untuk dibahas
3. Menetapkan Perda yang telah disetujui bersama DPRD
4. Menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah.

Dengan kewenangan ini, pemerintah daerah berkewajiban menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang menyajikan informasi penting bagi pengambilan keputusan pembangunan maupun kebijakan fiskal. Selain itu, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) berperan untuk membandingkan anggaran dan realisasinya, sehingga mencerminkan sejauh mana target legislatif dan eksekutif tercapai sesuai peraturan perundang-undangan. Laporan ini sekaligus menjadi instrumen utama dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan kepada publik.

Analisis Rasio Keuangan Daerah

Analisis rasio keuangan daerah adalah metode untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah dengan membandingkan komponen seperti pendapatan, belanja, dan dana perimbangan, sehingga mencerminkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Analisis ini juga berfungsi untuk menilai pencapaian tujuan organisasi, menjadi sarana pembelajaran pegawai, meningkatkan kinerja dan motivasi, serta mendukung akuntabilitas publik. Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini menggunakan beberapa rasio keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai alat analisis, antara lain

1. Rasio Kemandirian Daerah
2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah
3. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah
4. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Penelitian Terdahulu

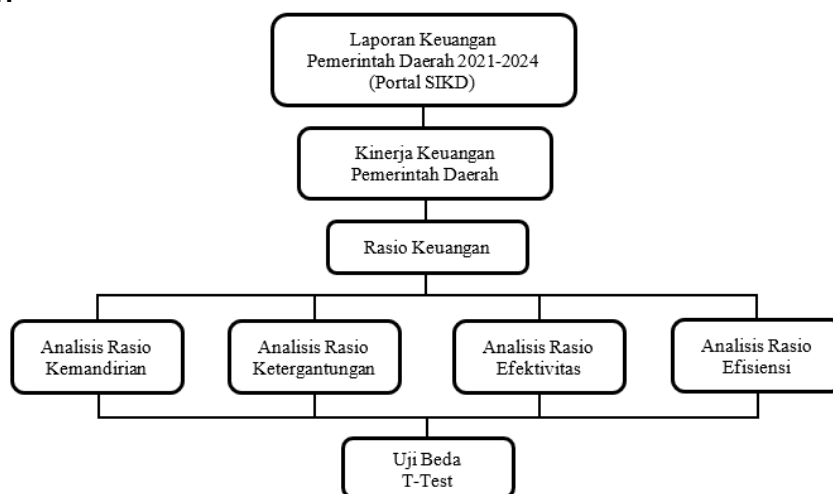
Penelitian oleh Wibowo, Saerang, dan Untu (2024) menganalisis kinerja keuangan kabupaten di wilayah Minahasa dan Bolang Mongondow Raya berdasarkan opini BPK tahun 2018-2022. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kinerja daerah yang memperoleh opini WTP dan Non WTP menggunakan rasio kemandirian, ketergantungan, efektivitas, dan efisiensi. Jenis penelitian ini adalah komparatif, dengan populasi delapan kabupaten di Sulawesi Utara. Data dianalisis menggunakan deskriptif dan uji perbedaan rata-rata dengan Independent Sample t-test. Hasil menunjukkan perbedaan signifikan pada rasio kemandirian dan

ketergantungan, sedangkan rasio efektivitas dan efisiensi tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan.

Penelitian oleh Ratu, Maramis, dan Rumokoy (2023) bertujuan untuk membandingkan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan dan non Kepulauan di Sulawesi Utara berdasarkan rasio kemandirian, ketergantungan, efektivitas, efisiensi, dan aktivitas. Penelitian ini bersifat komparatif dengan data sekunder, menggunakan populasi 15 kabupaten/kota dan sampel 6 kabupaten/kota yang dipilih secara *Simple Random Sampling*, mencakup 30 laporan keuangan daerah. Analisis dilakukan menggunakan deskriptif dan uji perbedaan rata-rata dengan Independent Sample t-test. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan signifikan pada rasio kemandirian, efisiensi, dan aktivitas antara kabupaten kepulauan dan non kepulauan.

Penelitian oleh Demvi Vebiani, Nugraha, dan Dian Hardiana (2022) bertujuan untuk menganalisis perbandingan kinerja keuangan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat sebelum dan selama pandemi COVID-19, menggunakan rasio kemandirian, derajat desentralisasi fiskal, efektivitas, dan efisiensi. Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif dengan uji paired sample t-test. Populasi terdiri dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat, dengan sampel jenuh sehingga seluruh populasi digunakan. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan kinerja keuangan hanya pada rasio efektivitas dan efisiensi, sedangkan rasio kemandirian dan derajat desentralisasi fiskal tidak menunjukkan perbedaan. Selama pandemi, rasio kemandirian dan derajat desentralisasi fiskal justru meningkat, sementara rasio efektivitas dan efisiensi menurun.

Model Penelitian



Gambar 1. Kerangka Berpikir
Sumber : Diolah oleh Peneliti (2025)

Hipotesis Penelitian

Hipotesis 1 (H1): Terdapat perbedaan signifikan dalam rasio kemandirian keuangan antara pemerintah daerah Kota Bitung dan Kota Tomohon.

Hipotesis 2 (H2): Terdapat perbedaan signifikan dalam rasio ketergantungan keuangan antara pemerintah daerah Kota Bitung dan Kota Tomohon.

Hipotesis 3 (H3): Terdapat perbedaan signifikan dalam rasio efektivitas keuangan antara pemerintah daerah Kota Bitung dan Kota Tomohon.

Hipotesis 4 (H4): Terdapat perbedaan signifikan dalam rasio efisiensi keuangan antara pemerintah daerah Kota Bitung dan Kota Tomohon.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain komparatif. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian berfokus pada pengukuran variabel secara objektif melalui data numerik yang dianalisis menggunakan teknik statistik. Sementara itu, desain komparatif digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis perbedaan atau persamaan satu atau lebih variabel penelitian pada dua atau lebih kelompok sampel, atau pada periode waktu yang berbeda.

Populasi, Sampel, dan Metode Sampling

Menurut Handayani (2020), populasi merupakan keseluruhan elemen yang memiliki karakteristik tertentu dan relevan dengan tujuan penelitian. Berdasarkan pengertian tersebut, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Daerah Kota Bitung dan Kota Tomohon pada periode 2021-2024, dengan unit analisis berupa observasi tahunan per daerah (tahun $\times$ daerah).

Selanjutnya, Asrulla *et al.*, (2023) mendefinisikan sampel sebagai bagian dari populasi yang mewakili objek penelitian. Sampel ditetapkan menggunakan teknik non-probability sampling dengan pendekatan purposive melalui sensus dokumen (total sampling), yaitu seluruh LRA tahunan kedua daerah pada periode tersebut yang tersedia dan lengkap melalui Portal Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Kementerian Keuangan serta memenuhi kebutuhan perhitungan rasio kinerja keuangan daerah.

Jenis Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif komparatif berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Bitung dan Kota Tomohon periode 2021-2024. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Portal Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai sumber resmi.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dan menelaah dokumen yang relevan dengan tujuan penelitian. Dokumen yang digunakan berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Bitung dan Kota Tomohon pada periode 2021-2024, yang diperoleh dari sumber resmi sebagai dasar analisis komparatif.

Definisi dan Pengukuran Variabel

1. Rasio Kemandirian Daerah

Rasio kemandirian digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik dengan mengandalkan sumber pendapatan daerah. Rasio ini mencerminkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer dari pemerintah pusat dan/atau provinsi. Semakin tinggi nilai rasio kemandirian, semakin besar kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi fiskalnya. Secara operasional, rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan membandingkan Pendapatan Asli Daerah terhadap total penerimaan yang berasal dari transfer pusat dan provinsi serta pinjaman.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

Untuk menafsirkan tingkat kemandirian keuangan daerah, digunakan klasifikasi pola hubungan dan tingkat kemampuan daerah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Sangat Rendah	0,00 - 25,00	Instruktif
Rendah	25,01 - 50,00	Konsultatif
Tinggi	50,01 - 75,00	Partisipatif
Sangat Tinggi	75,01 - 100	Delegatif

Sumber: Fathah dalam Wulandari et al., (2024:58)

2. Rasio Ketergantungan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah digunakan untuk mengukur tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan/atau provinsi dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Rasio ini mencerminkan kemampuan daerah dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), di mana semakin tinggi nilainya menunjukkan semakin besar ketergantungan terhadap dana transfer. Pengukuran rasio ketergantungan dilakukan melalui perbandingan antara pendapatan transfer dan total pendapatan daerah.

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Untuk menafsirkan tingkat ketergantungan keuangan daerah, digunakan kriteria penilaian sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. Kriteria Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah

Persentase Pendapatan Transfer terhadap Total Pendapatan (%)	Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah
0,00 - 10,00	Sangat Rendah
10,01 - 20,00	Rendah
20,01 - 30,00	Sedang
30,01 - 40,00	Cukup
40,01 - 50,00	Tinggi
> 50,00	Sangat Tinggi

Sumber: Mahmudi dalam Hafizi dan Amalia (2022:121)

3. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektivitas digunakan untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Rasio ini mencerminkan tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola dan memaksimalkan sumber-sumber PAD yang direncanakan, sehingga semakin tinggi nilainya menunjukkan kinerja penerimaan PAD yang semakin baik. Dalam penelitian ini, tingkat efektivitas PAD diukur melalui perbandingan antara realisasi penerimaan PAD dan target penerimaan PAD.

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Untuk menafsirkan hasil perhitungan, tingkat efektivitas PAD diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, yaitu:

Tabel 4. Kriteria Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Persentase Efektivitas	Kriteria Efektivitas
> 100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90% - 99%	Cukup Efektif

75% - 89%	Kurang Efektif
< 75%	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi dalam Hafizi dan Amalia (2022:122)

4. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio efisiensi keuangan daerah digunakan untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola belanja daerah secara optimal terhadap penerimaan yang diperoleh. Rasio ini mencerminkan sejauh mana sumber daya keuangan dimanfaatkan secara hemat dan tepat sasaran dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Secara konseptual, semakin rendah nilai rasio efisiensi, semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengendalikan dan mengalokasikan anggarannya. Pengukuran tingkat efisiensi keuangan daerah dilakukan dengan membandingkan realisasi belanja daerah dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

$$\text{Rasio Efisiensi Keuangan Daerah} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Untuk menafsirkan hasil perhitungan rasio efisiensi, digunakan kriteria kinerja keuangan sebagaimana disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Kriteria Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Persentase Efisiensi	Kriteria Efisiensi
$\geq 100\%$	Tidak Efisien
$= 100\%$	Efisiensi Berimbang
$< 100\%$	Efisien

Sumber: Fathah dalam Wulandari et al., (2024:60)

Metode Analisis Data

Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif merupakan pendekatan statistik yang digunakan untuk menggambarkan karakteristik data penelitian berdasarkan variabel yang diamati. Melalui analisis ini, data disajikan secara ringkas untuk memberikan gambaran umum mengenai pola, kecenderungan, dan sebaran variabel penelitian. Statistik deskriptif umumnya meliputi perhitungan ukuran pemusatan dan penyebaran data, seperti nilai rata-rata, median, modus, serta deviasi standar, yang berfungsi sebagai dasar pemahaman awal terhadap kondisi data sebelum dilakukan analisis lanjutan.

Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan melalui analisis komparatif untuk membandingkan kinerja keuangan antar pemerintah daerah berdasarkan variabel yang dapat diukur secara statistik. Metode yang digunakan adalah independent sample test guna mengidentifikasi adanya perbedaan yang signifikan antara Pemerintah Kota Bitung dan Kota Tomohon. Pengambilan keputusan didasarkan pada nilai signifikansi, di mana hipotesis alternatif (H_a) diterima apabila nilai Sig. $< 0,05$ yang menunjukkan adanya perbedaan kinerja keuangan, sedangkan hipotesis nol (H_0) diterima apabila nilai Sig. $> 0,05$ yang menunjukkan tidak adanya perbedaan (Sugiyono, 2019).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Kota Bitung merupakan salah satu kota strategis di Provinsi Sulawesi Utara yang berkembang pesat pada sektor perikanan dan industri maritim. Kota ini ditetapkan sebagai Kota Administratif pertama di Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1975 dan selanjutnya berstatus kotamadya melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990. Keberadaan Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) kelas A memperkuat peran kota ini dalam aktivitas ekonomi kelautan, khususnya melalui komoditas unggulan seperti tuna dan cakalang. Dari sisi keuangan daerah, kinerja Kota Bitung pada periode 2021-2024 menunjukkan fluktuasi, dengan realisasi pendapatan tertinggi pada tahun 2021 sebesar 111,49% dan belanja tertinggi pada tahun 2022 sebesar 128,21%, namun mengalami penurunan pada tahun 2024, baik pada pendapatan (90,95%) maupun belanja daerah (80,36%).

Sementara itu, Kota Tomohon merupakan daerah otonom yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 dan resmi berdiri pada 4 Agustus 2003. Kota ini memiliki keunggulan pada sektor pariwisata dan pertanian, yang didukung oleh penyelenggaraan Tomohon International Flower Festival (TIFF). Dalam pengelolaan keuangan daerah, Kota Tomohon menunjukkan kinerja relatif stabil, dengan realisasi pendapatan sebesar 102,89% pada tahun 2021 dan realisasi belanja tertinggi pada tahun 2022 sebesar 107,19%, meskipun pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 95,40% untuk pendapatan dan 90,53% untuk belanja daerah.

Hasil Penelitian

Uji *Descriptive Statistic*Tabel 6. Hasil *Descriptive Statistic* Rasio Kemandirian Daerah

Group Statistics							
Rasio Kemandirian				N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Rasio Kemandirian Daerah	Rasio Kemandirian Daerah Bitung			4	9.0000	1.15470	.57735
	Rasio Kemandirian Daerah Tomohon			4	8.0000	1.41421	.70711

Sumber: Hasil olah data SPSS (2025)

Hasil analisis pada Tabel 6 menunjukkan bahwa nilai rata-rata rasio kemandirian keuangan Kota Bitung (9,00) lebih tinggi dibandingkan Kota Tomohon (8,00). Selain itu, standar deviasi Kota Tomohon (1,41) yang lebih besar dibandingkan Kota Bitung (1,15) menunjukkan tingkat kemandirian yang lebih berfluktuasi, sementara Kota Bitung relatif lebih stabil.

Tabel 7. Hasil *Descriptive Statistic* Rasio Ketergantungan Daerah

Group Statistics					
Rasio Ketergantungan		N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Rasio Ketergantungan Daerah	Rasio Ketergantungan Daerah Bitung	4	84.2500	1.70783	.85391
	Rasio Ketergantungan Daerah Tomohon	4	87.5000	3.00000	1.50000

Sumber: Hasil olah data SPSS (2025)

Berdasarkan Tabel 7, hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa nilai rata-rata rasio ketergantungan keuangan Kota Tomohon (87,50) lebih tinggi dibandingkan Kota Bitung (84,25). Standar deviasi Kota Tomohon (3,00) yang lebih besar dibandingkan Kota Bitung (1,71) menunjukkan tingkat ketergantungan yang lebih berfluktuasi, sementara Kota Bitung relatif

lebih stabil.

Tabel 8. Hasil *Descriptive Statistic* Rasio Efektivitas PAD

Group Statistics						
Rasio Efektivitas PAD				N	Mean	Std. Deviation
						Std. Error Mean
Rasio Efektivitas PAD	Rasio Efektivitas PAD Bitung			4	78.2500	11.89888
	Rasio Efektivitas PAD Tomohon			4	83.0000	29.47315

Sumber: Hasil olah data SPSS (2025)

Berdasarkan hasil statistik deskriptif pada Tabel 8, diketahui nilai rata-rata rasio efektivitas PAD Kota Tomohon (83,00) lebih tinggi dibandingkan Kota Bitung (78,25). Namun, standar deviasi Kota Tomohon yang lebih besar (29,47) menunjukkan fluktuasi yang lebih tinggi dibandingkan Kota Bitung (11,90), hal ini menunjukkan adanya variasi yang lebih besar dalam realisasi PAD di kota tersebut.

Tabel 9. Hasil *Descriptive Statistic* Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Group Statistics						
Rasio Efisiensi Keuangan Daerah				N	Mean	Std. Deviation
						Std. Error Mean
Rasio Efisiensi Keuangan Daerah	Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Bitung			4	102.5000	18.52026
	Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Tomohon			4	103.2500	11.78629

Sumber: Hasil olah data SPSS (2025)

Berdasarkan hasil statistik deskriptif, diketahui nilai rata-rata rasio efisiensi keuangan daerah Kota Tomohon (103,25) sedikit lebih tinggi dibandingkan Kota Bitung (102,50) yang menunjukkan realisasi belanja daerah lebih besar dari anggaran. Sementara itu, standar deviasi Kota Bitung (18,52) yang lebih besar dibandingkan Kota Tomohon (11,79) menunjukkan fluktuasi yang lebih tinggi, sementara Kota Tomohon relatif lebih stabil.

Uji Hipotesis

Uji T-test

Tabel 10. Hasil Uji T-test Rasio Kemandirian Daerah

Independent Samples Test										
Levene's Test for Equality of Variances				t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
Rasio Kemandirian Bitung-Tomohon	Equal variances assumed	.000	1.000	1.095	6	.315	1.00000	.91287	-1.23371	3.23371
	Equal variances not assumed			1.095	5.769	.317	1.00000	.91287	-1.25555	3.25555

Sumber: Hasil olah data SPSS (2025)

Hasil uji t-test menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 1,000 berada di atas 0,05, yang mengindikasikan tidak terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik pada tingkat kemandirian keuangan antara Kota Bitung dan Kota Tomohon. Hal ini menunjukkan bahwa kedua daerah tersebut masih memiliki tingkat ketergantungan yang relatif sama terhadap dana transfer dari pemerintah pusat maupun provinsi, sehingga Hipotesis 1 ditolak.

Tabel 11. Hasil Uji T-test Rasio Ketergantungan Daerah

		Independent Samples Test								
		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means					95% Confidence Interval of the Difference	
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	Lower	Upper
Rasio Ketergantungan Bitung-Tomohon	Equal variances assumed	1.297	.298	-1.883	6	.109	-3.25000	1.72603	-7.47343	.97343
	Equal variances not assumed			-1.883	4.760	.121	-3.25000	1.72603	-7.75514	1.25514

Sumber: Hasil olah data SPSS (2025)

Berdasarkan hasil uji t-test di atas, diketahui nilai signifikansi sebesar 0,298, yaitu lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam tingkat ketergantungan keuangan antara Kota Bitung dan Kota Tomohon. Kondisi ini menunjukkan bahwa kedua kota masih cukup bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat maupun provinsi, oleh karena itu Hipotesis 2 ditolak.

Tabel 12. Hasil Uji T-test Rasio Efektivitas PAD

		Independent Samples Test								
		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means					95% Confidence Interval of the Difference	
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	Lower	Upper
Rasio Efektivitas PAD Bitung-Tomohon	Equal variances assumed	2.067	.201	-.299	6	.775	-4.75000	15.89222	-43.63685	34.13685
	Equal variances not assumed			-.299	3.953	.780	-4.75000	15.89222	-49.08320	39.58320

Sumber: Hasil olah data SPSS (2025)

Berdasarkan Tabel 12, nilai signifikansi uji t-test sebesar 0,201 yang lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara Kota Bitung dan Kota Tomohon. Hal ini mengindikasikan bahwa efektivitas pencapaian PAD kedua kota relatif setara. Dengan demikian, Hipotesis 3 ditolak.

Tabel 13. Hasil Uji T-test Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

		Independent Samples Test								
		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means					95% Confidence Interval of the Difference	
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	Lower	Upper
Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Bitung-Tomohon	Equal variances assumed	11.295	.015	-.068	6	.948	-.75000	10.97630	-27.60804	26.10804
	Equal variances not assumed			-.068	5.088	.948	-.75000	10.97630	-28.81997	27.31997

Sumber: Hasil olah data SPSS (2025)

Berdasarkan hasil uji t-test untuk Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,015, yaitu lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara Kota Bitung dan Tomohon, yang mengindikasikan bahwa tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah di kedua kota tidak sama dan salah satu kota mampu memanfaatkan sumber daya keuangannya secara lebih optimal. Dengan kondisi ini, Hipotesis 4 diterima.

Pembahasan

Perbandingan Rasio Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bitung dan Kota Tomohon

Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan Kota Bitung sedikit lebih tinggi dibandingkan Kota Tomohon, namun perbedaan ini tidak signifikan secara statistik, sehingga kedua daerah memiliki tingkat kemandirian yang relatif setara. Rasio ini mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan operasional secara mandiri melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga daerah tidak terlalu bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat maupun provinsi. Dengan kata lain, semakin tinggi rasio ini, semakin besar kapasitas daerah dalam menghasilkan pendapatan sendiri.

Selain itu, faktor yang memengaruhi kondisi tersebut kemungkinan meliputi keterbatasan pemanfaatan potensi PAD, tingginya ketergantungan pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), serta karakteristik kedua daerah yang serupa, seperti jumlah penduduk, kondisi geografis, dan basis ekonomi. Adapun kondisi ini, berbeda dari temuan Ratu, Maramis, dan Rumokoy (2023), yang melaporkan adanya perbedaan signifikan dalam kemandirian keuangan antar daerah. Oleh karena itu, hal ini menunjukkan bahwa faktor kontekstual dan karakteristik masing-masing daerah dapat memengaruhi tingkat kemandirian secara berbeda.

Sejalan dengan temuan tersebut, peningkatan PAD dan pengurangan ketergantungan pada dana transfer menjadi langkah yang direkomendasikan. Langkah ini dapat diwujudkan melalui optimalisasi pemungutan pajak daerah, pengembangan ekonomi lokal, dan peningkatan tata kelola keuangan. Dengan demikian, upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan rasio kemandirian serta mendukung kinerja keuangan daerah yang lebih optimal dan berkelanjutan.

Perbandingan Rasio Ketergantungan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bitung dan Kota Tomohon

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan keuangan Kota Bitung dan Kota Tomohon tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Dengan demikian, kedua daerah masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat maupun provinsi. Rasio ketergantungan menggambarkan sejauh mana suatu daerah mengandalkan dana eksternal, khususnya dana perimbangan, dalam membiayai belanja daerah. Artinya, semakin tinggi rasio tersebut, semakin besar ketergantungan daerah terhadap transfer pusat, yang juga menunjukkan bahwa kapasitas fiskal daerah masih terbatas. Dalam hal ini, baik Kota Bitung maupun Kota Tomohon belum menunjukkan tingkat kemandirian fiskal yang kuat.

Situasi ini kemungkinan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kemampuan PAD yang belum optimal, terbatasnya basis ekonomi lokal yang dapat dikembangkan, pendapatan daerah yang belum sebanding dengan kebutuhan belanja publik, serta kurangnya inovasi dalam peningkatan sumber pendapatan daerah. Selain itu, temuan ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wibowo, Saerang, dan Untu (2024), yang menemukan adanya perbedaan signifikan dalam tingkat ketergantungan fiskal antar daerah, menunjukkan bahwa karakteristik dan kondisi lokal dapat memengaruhi ketergantungan daerah secara berbeda.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah Kota Bitung dan Kota Tomohon untuk mengambil langkah strategis dalam mengurangi ketergantungan fiskal. Strategi tersebut dapat mencakup optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah, pengembangan sektor ekonomi lokal, peningkatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien dan mandiri. Dengan mendorong peningkatan PAD dan pengurangan ketergantungan pada dana transfer, kinerja keuangan daerah diharapkan menjadi lebih berkelanjutan serta mendukung pembangunan yang berbasis pada potensi lokal.

Perbandingan Rasio Efektivitas Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bitung dan Kota Tomohon

Hasil analisis menunjukkan bahwa efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Tomohon sedikit lebih tinggi dibanding Kota Bitung, namun perbedaan tersebut tidak signifikan secara statistik. Dengan kata lain, kemampuan kedua kota dalam merealisasikan target PAD relatif seimbang. Efektivitas PAD mencerminkan sejauh mana realisasi pendapatan daerah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Nilai efektivitas yang tinggi menunjukkan bahwa daerah mampu merencanakan dan mengelola potensi pendapatan dengan cukup baik, sehingga meskipun terdapat perbedaan nilai rata-rata, kedua kota termasuk dalam kategori cukup efektif.

Beberapa faktor yang dapat memengaruhi efektivitas PAD antara lain ketepatan dalam penyusunan target tahunan, efisiensi pemungutan pajak dan retribusi, partisipasi masyarakat sebagai wajib pajak, tingkat kepatuhan terhadap peraturan pajak daerah, serta stabilitas ekonomi lokal. Selain itu, temuan ini berbeda dengan penelitian Vebiani, Nugraha, dan Hardiana (2022), yang menemukan adanya perbedaan signifikan dalam efektivitas PAD antar daerah. Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik lokal dan praktik pengelolaan pendapatan dapat memengaruhi hasil pengelolaan PAD secara berbeda, sehingga temuan setiap daerah perlu dilihat dalam konteks masing-masing.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas PAD, pemerintah Kota Bitung dan Kota Tomohon disarankan untuk terus melakukan pembenahan, antara lain dengan menyusun target PAD yang realistis dan berbasis data potensi, memperbaiki sistem pemungutan dan pelaporan pendapatan, meningkatkan kesadaran pajak melalui sosialisasi dan pelayanan yang lebih baik, serta mengembangkan sistem digital dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Dengan langkah-langkah tersebut, efektivitas PAD diharapkan meningkat, yang pada gilirannya dapat memperkuat kemandirian fiskal dan mendukung kinerja keuangan daerah secara berkelanjutan.

Perbandingan Rasio Efisiensi Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bitung dan Kota Tomohon

Analisis menunjukkan bahwa rasio efisiensi keuangan daerah berbeda secara signifikan antara Kota Bitung dan Kota Tomohon. Dengan kata lain, kedua kota memiliki kemampuan yang berbeda dalam mengelola anggaran secara efektif dan hemat. Rasio efisiensi mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah menggunakan dana yang tersedia secara proporsional terhadap pendapatan. Nilai rasio yang lebih tinggi menandakan pengeluaran yang melebihi kemampuan fiskal daerah, sehingga menunjukkan potensi ketidakefisienan dalam pengelolaan anggaran. Perbedaan rasio ini menegaskan bahwa salah satu kota berhasil memanfaatkan anggaran secara lebih optimal dibandingkan yang lain.

Beberapa faktor yang kemungkinan memengaruhi perbedaan efisiensi ini meliputi kualitas penyusunan anggaran, kesesuaian realisasi pendapatan dengan proyeksi, pengendalian belanja, serta efektivitas sistem pengawasan internal. Selain itu, temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian Ratu, Maramis, dan Rumokoy (2023), yang menemukan adanya perbedaan signifikan dalam rasio efisiensi keuangan antar daerah. Hal ini menegaskan bahwa karakteristik lokal, kapasitas administrasi, dan praktik pengelolaan anggaran dapat menyebabkan variasi kinerja efisiensi antar daerah.

Oleh karena itu, pemerintah Kota Bitung dan Kota Tomohon disarankan untuk mengevaluasi dan memperkuat strategi pengelolaan belanja dan pendapatan daerah, termasuk meningkatkan sistem perencanaan, pengawasan, dan akuntabilitas keuangan. Dengan upaya tersebut, efisiensi penggunaan anggaran diharapkan meningkat, mendukung kinerja pembangunan, dan memperkuat kondisi keuangan daerah secara berkelanjutan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa tingkat rasio kemandirian dan efektivitas keuangan Kota Bitung dan Kota Tomohon selama periode 2021-2024 relatif seimbang. Analisis rasio ketergantungan menunjukkan bahwa kedua daerah masih cukup bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Perbedaan signifikan hanya terlihat pada rasio efisiensi, yang mencerminkan variasi kemampuan pengelolaan anggaran antar kota. Karakter ekonomi masing-masing kota turut memengaruhi kinerja keuangan, dengan Bitung lebih menonjol di sektor perikanan dan industri, sedangkan Tomohon unggul di pariwisata dan pertanian, yang berdampak pada potensi Pendapatan Asli Daerah dan strategi pengelolaan anggarannya. Oleh karena itu, penguatan Pendapatan Asli Daerah, pengurangan ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat, serta peningkatan perencanaan dan pengawasan anggaran menjadi langkah penting untuk mendukung keberlanjutan kinerja keuangan daerah, sekaligus memperkuat pelayanan publik.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dirumuskan, berikut adalah beberapa saran yang dapat diberikan oleh peneliti:

1. Bagi Objek Penelitian

- Pemerintah Kota Bitung dan Kota Tomohon dianjurkan untuk melakukan evaluasi rutin terhadap kinerja keuangan setiap tahun sebagai upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran.
- Upaya strategis perlu dilakukan untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dapat dikurangi.
- Pengelolaan anggaran secara efisien dan efektif perlu terus dioptimalkan agar program pembangunan dapat terlaksana sesuai sasaran dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

- Disarankan bagi penelitian berikutnya untuk menambahkan indikator lain, seperti rasio pertumbuhan atau rasio belanja modal dan operasional, agar analisis kinerja keuangan menjadi lebih komprehensif.
- Pendekatan statistik yang lebih lanjut, misalnya uji beda atau ANOVA, dapat digunakan untuk menguji signifikansi perbedaan antar daerah secara lebih tepat.
- Menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif, misalnya melalui wawancara dengan pihak pengelola keuangan daerah, dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan

DAFTAR PUSTAKA

- Asrulla, R., Jailani, M. S., & Jeka, F. (2023). Populasi dan sampling (kuantitatif), serta pemilihan informan kunci (kualitatif) dalam pendekatan praktis. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 26320-26332. <https://www.researchgate.net/profile/Asrulla-Asrulla/publication/386875018>
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (1975). *Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1975 tentang Pembentukan Kota Administratif Bitung*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/67666/pp-no-4-tahun-1975>

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (1990). *Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/46712/uu-no-7-tahun-1990>
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (1990). *Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/46712/uu-no-7-tahun-1990>
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2003). *Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara* <https://peraturan.bpk.go.id/Details/43010/uu-no-10-tahun-2003>
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40768/uu-no-32-tahun-2004>
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/122024/uu-no-14-tahun-2019>
- Dilliana, S. M., & Herdi, H. (2022). *Manajemen keuangan daerah* (hlm. 25-28). Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- Fathah, R. N. (2017). Analisis rasio keuangan untuk penilaian kinerja pada pemerintah daerah Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal EBBANK*, 8(1), 33-48. <https://www.ebbank.stiebbank.ac.id/index.php/EBBANK/article/view/109>
- Hafizi, R., & Amalia, F. A. (2022). Kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Jember. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 116-130. <https://doi.org/10.18196/jati.v5i2.14194>
- Handayani, R. (2020). *Metodologi penelitian sosial*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika.
- Harahap, M. N., Dailibas, D., Nasution, R., Chaerudin, C., & Muslihat, A. (2023). Dampak Stabilitas Keuangan Daerah terhadap Ketahanan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 20(1), 21-30. <https://doi.org/10.35384/jkp.v20i1.499>
- Mahmudi. (2016). *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Prasetyadi, K. O. (2023, Oktober 30). Menakar masa depan Bitung setelah Penangkapan Ikan Terukur. *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/10/24/bagaimana-masa-depan-bitung-setelah-penangkapan-ikan-terukur-diberlakukan>
- Rabbi, C. P. A. (2021, Oktober 5). Bitung ditargetkan jadi sentra perikanan dunia, produsen tuna-cakalang. *Katadata.co.id*. <https://katadata.co.id/berita/nasional/615c04f990c3c/bitung-ditargetkan-jadi-sentra-perikanan-dunia-produsen-tuna-cakalang>
- Ratu, V. W., Maramis, J. B., & Rumokoy, L. J. (2023). Analisis komparasi kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten kepulauan dan non kepulauan di Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*, 1428-1438. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/50143>

- Redaksi. (2024, Juni 13). Statistik kunjungan wisatawan melambung tinggi, Tomohon kota wisata dunia mulai nampak. *Mediakontras.com*. <https://mediakontras.com/statistik-kunjungan-wisatawan-melambung-tinggi-tomohon-kota-wisata-dunia-mulai-nampak/>
- Sugiyono. (2019). Metode penelitian kualitatif, kuantitatif dan R&D. Alfabeta.
- Vebiani, D., Nugraha, N., & Hardiana, D. (2022). Analisis kinerja keuangan daerah sebelum dan pada saat pandemi COVID-19 (studi kasus pada kabupaten dan kota Provinsi Jawa Barat). *Fineteach: Journal of Finance, Entrepreneurship, and Accounting Education Research*, 1(2), 113-126. <https://ejournal.upi.edu/index.php/fineteach/article/view/48137/19563>
- Wibowo, B. A., Saerang, I. S., & Untu, V. N. (2024). Analisis komparasi kinerja keuangan daerah pemerintah daerah kabupaten di seluruh wilayah Minahasa dan kabupaten di seluruh wilayah Bolmong berbasis opini BPK tahun 2018-2022. *Jurnal EMBA*, 403-411. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/58656>
- Wulandari, R., Lestari, B. A. H., & Suryantara, A. B. (2023). Analisis rasio keuangan dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Mataram. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 3(2), 56-69. <https://doi.org/10.29303/risma.v3i2.657>